



## RESEARCH ARTICLE

# Kebijakan Ekonomi Sultan Agung dan Transformasi Perekonomian Kesultanan Mataram Islam Tahun 1613-1645 M

## *Sultan Agung Economic Policy and the Economic Transformation of the Islamic Mataram Sultanate in 1613-1645 M*

Received: May 14, 2026

Accepted: July 16, 2026

Published: July 17, 2026

### \*Corresponding author:

Oktavian Priyo Legowo,  
Fakultas Adab dan Bahasa, UIN  
Raden Mas Said Surakarta,  
Indonesia

Email:

[oktavianpriyolegowo@gmail.com](mailto:oktavianpriyolegowo@gmail.com)

Oktavian Priyo Legowo\*, Miftakhur Rochmah, Muhammad Sabilur Rosyad

**Abstract:** Studies on Sultan Agung Hanyokrokusumo have predominantly emphasized political, military, and territorial expansion, while his economic policies have received comparatively limited scholarly attention. This study examines the contribution of Sultan Agung's economic policies in agriculture, trade, and taxation to the economic transformation of the Islamic Mataram Sultanate during 1613–1645. This historical research employs the historical method, including heuristic source collection, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through library research using Javanese *babad* (chronicles), Dutch East India Company (VOC) archives, and relevant academic literature, and were analyzed using historical and descriptive-analytical approaches. The findings indicate that agricultural intensification, strengthened trade networks, and a centralized taxation system reinforced food security, state revenue, and regional economic integration. The novelty of this study lies in analyzing these three sectors as an integrated economic strategy that strengthened Sultan Agung's rule. Further research is recommended to examine the socio-economic impacts of these policies at the local level using more diverse historical sources.

**Keywords:** Sultan Agung, Islamic Mataram Sultanate, economic policy

**Abstrak:** Kajian mengenai Sultan Agung Hanyokrokusumo selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek politik, militer, dan ekspansi wilayah, sedangkan kebijakan ekonominya masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi kebijakan ekonomi Sultan Agung di bidang pertanian, perdagangan, dan perpajakan terhadap transformasi ekonomi Kesultanan Mataram Islam pada periode 1613–1645. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan memanfaatkan babad Jawa, arsip VOC, dan berbagai literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara historis dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pertanian, penguatan jaringan perdagangan, dan sistem perpajakan yang terpusat mampu memperkuat ketahanan pangan, pendapatan negara, dan integrasi ekonomi antardaerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis ketiga sektor tersebut sebagai satu strategi ekonomi yang terpadu dalam memperkuat kekuasaan Sultan Agung. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan mengenai dampak sosial-ekonomi kebijakan tersebut pada tingkat lokal dengan memanfaatkan sumber sejarah yang lebih beragam.

**Kata Kunci:** Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam, kebijakan ekonomi

### About Author

Oktavian Priyo Legowo, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; Miftakhur Rochmah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, UIN Salatiga, Indonesia; Muhammad Sabilur Rosyad, Fakultas Ushuluddin, Adab and Da'wah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

**To cite this article:** Legowo, O. P. ., Rochmah, M., & Rosyad, M. S. . (2026). Kebijakan Ekonomi Sultan Agung dan Transformasi Perekonomian Kesultanan Mataram Islam Tahun 1613-1645 M. *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 2(2), 53–65. <https://doi.org/10.70742/dampeng.v2i2.1045>



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Pada abad ke-17, Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, adalah salah satu kerajaan paling kuat di Jawa. Sultan Agung merupakan putra mahkota dari Panembahan Krapyak dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati yang lahir pada tahun 1593 (Munawar 2021, 1–13). Beliau yang memerintah dari tahun 1613-1645, dianggap sebagai sosok yang visioner dan reformis dalam hal politik dan militer, serta ekonomi. Selama pemerintahannya, sektor-sektor kerajaan Mataram berkembang pesat, termasuk pertanian dan perdagangan (de Graaf 1986, 21). Faktor-faktor diatas yang menjadi pendorong perekonomian Mataram Islam pada masa Sultan Agung. Ini termasuk lokasi yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sultan Agung menerapkan sistem pertanian yang efisien, Sultan Agung meningkatkan irigrasi dan meningkatkan produksi padi. Selain itu, perdagangan lokal dan internasional berkembang pesat di Mataram, menjadikannya pusat berbagai rute perdagangan (Kartodirdjo 1993, 214).

Pada masa itu, kondisi Kerajaan Mataram Islam dihadapkan pada situasi yang sangat rumit. Hal ini dapat dilihat sejak awal mulai naik tahta di mana situasi internal pemerintahan diliputi ketegangan politik dengan para penguasa di berbagai daerah di Jawa (Munawar 2020, 10). Para adipati dan penguasa daerah bersaing merebutkan kekuasaan, yang menyebabkan keadaan internal tidak stabil. Penguasa lokal seperti Pajang dan Demak ingin mencegah Sultan Agung memperluas wilayah kekuasaan. Untuk menyelesaikan masalah ini, ia menggunakan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi, mencapai kesepakatan dengan beberapa penguasa lokal, dan menaklukkan daerah yang tidak mau tunduk. Penaklukan Batavia adalah salah satu faktor penting yang meningkatkan peran ekonomi. Hal tersebut sangat berguna untuk peningkatan perekonomian Mataram yang signifikan, Sultan Agung berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, memperkuat pemerintahan kerajaan, memperbaiki saluran irigasi, dan membuat jalan serta membangun pusat perdagangan ditengah ketegangan.

Kesultanan Mataram menentukan kapan kerajaan Islam di seluruh Nusantara muncul. Ini tercermin dari keinginan para raja untuk memperluas wilayah mereka dan mengislamkan penduduknya, serta keterlibatan para penghulu dan pemuka agama dalam menyebarkan budaya ala Islam di berbagai wilayah Jawa. Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pemerintahan dan keluarga raja tinggal di Kutaneegara. Kedua, tanah narawita digunakan sebagai tempat tinggal bagi bangsawan kerajaan yang mengabdikan kepada raja. Ketiga, bangsawan yang berasal dari kerajaan memiliki tanah yang sangat besar atau luas. Keempat, "Mancanegara" berarti wilayah di luar negeri. Ini mencakup wilayah di timur Ponorogo dan barat Purworejo, wilayah barat Purworejo, wilayah pesisir barat Purworejo, dan wilayah luar negeri lainnya. bagian utara Jawa, bagian barat Demak, dan bagian timur Demak (Sinaga et al. 2023, 1–9).

Mataram tetap menjadi kerajaan yang kuat selama pemerintahan Sultan Agung. Namun, ketika Amangkurat I memerintah dari 1645 hingga 1677, kekuatan Mataram semakin melemah. Daerah-daerah pantai wilayah negara berangsur-angsur dianeksasi oleh Belanda, seperti Karawang, Semarang (1677), Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan, dan Madura sehingga pusat negara makin dipisahkan dari pantai. Akibatnya, Kerajaan Mataram Kembali ke dalam kegiatan agraris dan mulai melepaskan tradisi perdagangan-pelayaran (Zamzami 2018, 154–65).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Zaid Munawar tahun 2013 dengan judul *Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613 - 1645 M)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti lebih fokus pada dinamika politik dan kebijakan yang diberlakukan oleh Sultan Agung dan seberapa dampaknya terhadap berbagai bidang kehidupan di dalam Kerajaan Mataram Islam (Munawar 2021, 1). Kemudian yang kedua

penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Mira Handayani, tahun 2024 dengan judul *Kejayaan Kerajaan Mataram Islam dan Pengaruhnya Untuk Nusantara Pada Masa Pemerintahan Sultan Agung Tahun 1613-1645 M*. Penelitian itu lebih fokus terhadap pengaruh akulturasi yang cukup besar terhadap nusantara, dimana Akulturasi Mataram Islam mencakup sosial ekonomi, budaya dan politik di berbagai wilayah nusantara. Ketiga, penelitian dari Muhamad Iqbal Malik, Veri Fadhli Yasin, “*Kejayaan Kerajaan Mataram Islam dan Pengaruhnya untuk Nusantara pada Masa Pemerintahan Sultan Agung Tahun 1613-1645 M*”. Penelitian ini juga sangat membantu peneliti dalam menyaring informasi penting tentang peranan sentral Kerajaan Mataram Islam terhadap perkembangan Nusantara pada waktu itu.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas kebijakan Sultan Agung, kejayaan Kerajaan Mataram Islam, dan pengaruhnya terhadap Nusantara, masih terdapat persoalan Sejarah yang banyak dikaji secara mendalam. Tentang bagaimana dinamika perekonomian Masyarakat Mataram Islam berlangsung melalui pengelolaan sektor pertanian, sistem perpajakan, distribusi hasil produksi, dan hubungan antara kebijakan ekonomi Kerajaan dengan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara khusus menjelaskan keterkaitan antara kebijakan ekonomi Sultan Agung dengan proses penguatan kekuasaan politik dan keberlangsungan ekonomi Kerajaan Mataram Islam secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melengkapi kajian yang telah ada dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai dinamika perekonomian Kerajaan Mataram Islam pada Masa Sultan Agung. Maka diharapkan dapat memperkaya kajian historiografis khususnya dalam bidang Sejarah ekonomi Indonesia.

Dalam historiografi Kerajaan Mataram Islam terdapat perbedaan pandangan di kalangan sejarawan mengenai faktor utama yang menjadi latar belakang kejayaan Mataram pada masa Sultan Agung. Sebagian sejarawan menilai bahwa kejayaan Mataram yang utama disebabkan oleh keberhasilan ekspansi politik dan kekuatan militer Sultan Agung. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menekankan bahwa pencapaian tersebut juga merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang diterapkan Kerajaan seperti pengelolaan pajak, Pembangunan infrastruktur irigasi, dan penguasaan jalur perdagangan yang mampu memperkuat kondisi ekonomi Kerajaan. Dilihat dari perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam sebagai bagian dari penjelasan mengenai kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung.

Penelitian mengenai Kesultanan Mataram Islam pada masa Sultan Agung telah banyak dilakukan oleh para sejarawan. H. J. de Graaf menitikberatkan kajiannya pada ekspansi politik dan proses konsolidasi kekuasaan Mataram, sedangkan Denys Lombard melihat perkembangan Mataram dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan jaringan ekonomi di Pulau Jawa. Sementara itu, Sartono Kartodirdjo memberikan perhatian pada dinamika struktur sosial dan hubungan antara negara dengan masyarakat dalam proses pembentukan kekuasaan di Jawa. Penelitian yang lebih mutakhir, seperti yang dilakukan oleh Munawar serta Handayani dkk., mulai mengkaji aspek kebijakan ekonomi Sultan Agung, terutama pada bidang perpajakan, pertanian, dan perdagangan. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung membahas setiap sektor ekonomi secara parsial dan belum menjelaskan keterkaitan antara struktur ekonomi Mataram, kebijakan ekonomi Sultan Agung, serta dampaknya terhadap transformasi ekonomi dan stabilitas kerajaan secara komprehensif.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara struktur perekonomian Kesultanan Mataram Islam, kebijakan ekonomi yang diterapkan Sultan Agung, serta dampaknya terhadap transformasi ekonomi dan stabilitas kerajaan pada periode 1613–1645. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab

tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana struktur perekonomian Kesultanan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung, bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam sektor pertanian, perdagangan, dan perpajakan, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi transformasi ekonomi dan stabilitas politik kerajaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas kebijakan ekonomi secara sektoral atau menempatkannya sebagai pelengkap kajian politik dan militer, penelitian ini menginterpretasikan kebijakan ekonomi Sultan Agung sebagai bagian dari strategi konsolidasi negara yang berperan dalam memperkuat kapasitas fiskal kerajaan, mengintegrasikan wilayah agraris dan pesisir, serta menopang ekspansi kekuasaan Mataram. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian mengenai sejarah ekonomi Kesultanan Mataram Islam, tetapi juga menawarkan perspektif historiografis yang menempatkan kebijakan ekonomi sebagai salah satu faktor utama dalam pembentukan dan penguatan negara Mataram pada abad ke-17.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kebijakan ekonomi Sultan Agung Hanyokrokusumo serta pengaruhnya terhadap transformasi perekonomian Kesultanan Mataram Islam pada periode 1613–1645. Pemilihan metode sejarah didasarkan pada karakter penelitian yang berupaya merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis melalui analisis terhadap berbagai sumber sejarah yang relevan. Penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kebijakan agraria, perdagangan, dan sistem perpajakan sebagai fondasi perekonomian Kesultanan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung.

Tahap pertama penelitian dilakukan melalui heuristik, yaitu penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber primer diperoleh dari naskah sejarah tradisional, seperti *Babad Tanah Jawi*, serta arsip-arsip kolonial Belanda yang memuat informasi mengenai kondisi ekonomi, perdagangan, dan hubungan antara Mataram dengan pihak VOC pada abad ke-17. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan sumber sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sejarah ekonomi, politik, serta pemerintahan Kesultanan Mataram Islam. Penelusuran sumber dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, repositori jurnal ilmiah, dan basis data akademik daring. Pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penulis, serta keterkaitan isi sumber dengan kebijakan ekonomi Sultan Agung.

Setelah sumber terkumpul, dilakukan tahap verifikasi melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan menelaah asal-usul sumber, waktu penulisan, latar belakang penyusun, serta autentisitas dokumen yang digunakan. Sementara itu, kritik internal dilakukan dengan membandingkan informasi antarsumber untuk menilai konsistensi data, objektivitas isi, dan tingkat kepercayaannya. Informasi yang diperoleh dari naskah tradisional dibandingkan dengan arsip kolonial maupun kajian akademik modern sehingga diperoleh data sejarah yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan ekonomi Sultan Agung dengan perkembangan perekonomian Kesultanan Mataram Islam. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data mengenai pembangunan pertanian, pengelolaan irigasi, aktivitas perdagangan, serta sistem perpajakan guna menjelaskan proses transformasi ekonomi yang terjadi selama masa pemerintahan Sultan Agung. Penafsiran dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Jawa pada abad ke-17 sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan ekonomi kerajaan.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, kronologis, dan analitis. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses kritik dan interpretasi disusun untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Sultan Agung berperan dalam memperkuat basis agraria, mengembangkan jaringan perdagangan, meningkatkan kapasitas fiskal kerajaan, serta mendorong transformasi perekonomian Kesultanan Mataram Islam pada periode 1613–1645. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekonstruksi sejarah yang objektif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi dan perkembangan Kesultanan Mataram Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Sultan Agung Hanyakrakusuma

Berdasarkan arsip *Pengenalan Raja-Raja Surakarta Sejak Mataram*, disebutkan bahwa Hanyakrakusuma yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung Hanyakrakusuma lahir pada tahun 1613 dan wafat pada tahun 1645, serta menempati posisi sebagai raja ke-32 dalam struktur dinasti Mataram (Adiwijaya 1956). Informasi kronologis tersebut tidak hanya menunjukkan kesinambungan genealogis kekuasaan sejak masa Panembahan Senapati hingga generasi penerusnya, tetapi juga menegaskan posisi sentral Sultan Agung dalam perkembangan politik serta pembentukan struktur kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Hal tersebut terjadi karena dalam sistem monarki Mataram, kesinambungan garis keturunan menjadi dasar utama legitimasi kekuasaan, maka pencatatan silsilah urutan raja dalam naskah tidak hanya berfungsi sebagai catatan Sejarah. Fungsinya juga sebagai sarana untuk menegaskan keabsahan kedudukan seorang penguasa (Prawirawinarsa dan Jayengpranata 1921). Dalam kajian historiografi Jawa, penggunaan gelar Hanyakrakusuma dalam berbagai naskah memperlihatkan bahwa identitas seorang raja tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi simbolik yang berkaitan erat dengan legitimasi kekuasaan (Candrakanta 1902–1912). Hal ini tercermin dalam sejumlah sumber tradisional, seperti *Babad Kartasura* dan *Candrakanta*, yang sama-sama merekam penggunaan gelar tersebut dalam konteks kekuasaan sekaligus tradisi Kerajaan. Kesamaan penyebutan gelar dalam beberapa naskah menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara pengakuan simbolik terhadap raja dan penguatan legitimasi politiknya. Semakin kuat legitimasi tersebut ditegaskan dalam penulisan Sejarah Jawa semakin kuat pula kedudukan Sultan Agung sebagai penguasa yang sah dalam struktur Kerajaan Mataram Islam (Padmasusastra 1898).

Dalam tradisi historiografi Jawa, figur Sultan Agung yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Rangsang tidak hanya memiliki signifikansi politik, tetapi juga berperan dalam penguatan struktur perekonomian Mataram. Pergantian gelar dari bangsawan menjadi raja mencerminkan proses konsolidasi kekuasaan yang berdampak pada penguasaan sumber daya ekonomi, termasuk tanah, tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi. Penyebutan Pangeran Rangsang dalam *Bauwarna* menunjukkan identitas awal sebelum memperoleh gelar kerajaan, yang menandai fase transisi menuju otoritas penuh dalam sistem kekuasaan Mataram (Padmasusastra 1898). Tahap ini mencerminkan proses legitimasi awal seorang penguasa yang tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh pengakuan politik dan kultural dalam lingkungan istana. Perubahan status tersebut menjadi penting karena seorang penguasa baru hanya dapat menjalankan kewenangan pemerintahan secara penuh setelah memperoleh pengakuan sebagai raja. Maka terdapat hubungan sebab-akibat antara legitimasi politik dengan kemampuan penguasa mengendalikan sumber daya Kerajaan. Meskipun naskah-naskah tidak menjelaskan secara rinci kebijakan ekonominya, perubahan status dari Pangeran Rangsang menjadi Sultan Agung menunjukkan bahwa

penguasaan atas sumber daya Kerajaan berlangsung seiring dengan pengesahan kedudukan politiknya.



Gambar 1: Sultan Agung Hanyakrakusuma Sang Raja Mataram (Sumber: <https://share.google/AALKPIbDZ34gszU4B>)

Sementara itu, dalam *Kronik Tanah Jawi*, disebutkan bahwa setelah terjadinya pergantian kekuasaan, Pangeran Rangsang naik takhta dan memperoleh gelar Prabu Pandhita Cakrakusuma. Gelar tersebut tidak hanya menandakan pengesahan formal sebagai raja, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan otoritas spiritual dan intelektual seorang penguasa Jawa (Kronik Tanah Jawi 1939–1941). Dalam konteks pemerintahan, legitimasi ini menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas politik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlangsungan dan penguatan sistem ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Ini menunjukkan bahwa legitimasi politik dipandang sebagai prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintah yang stabil. Dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan Sultan Agung sebagai raja, proses pemerintahan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengatur Kerajaan (Chronicle of Java 1917).

### Dinamika Kehidupan Ekonomi

Dalam memperkuat ekonomi kerajaan, Sultan Agung Hanyokrokusumo menerapkan pengawasan terhadap wilayah pesisir dan jalur perdagangan (de Graaf 1986, 138). Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh VOC yang mulai berkembang di Batavia (de Graaf 1986, 140). Namun, peperangan melawan VOC membutuhkan biaya besar sehingga memengaruhi stabilitas ekonomi kerajaan menjelang akhir pemerintahan Sultan Agung (de Graaf 1986, 145). Kekuatan politik dan ekonomi Mataram meningkat sebagai hasil dari penyatuan kerajaan Islam di pesisir Jawa selama pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Ekonomi Mataram bergantung pada perdagangan dan pelayaran selain ekonomi agraris (Handayani et al. 2024, 121–138). Pelabuhan Jawa terus berdagang dengan Malaka dan Maluku sampai Mataram menaklukkannya. Perdagangan luar negeri Jawa menurun sebagai akibat dari dua faktor. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan Belanda di kepulauan Indonesia bagian timur, dan yang kedua adalah sikap raja Mataram yang secara bertahap meremehkan para pedagang pantai. Belanda berusaha mendapatkan monopoli perdagangan cengkeh dan pala dengan cara yang baik dan buruk. Ketika Mataram bangkit,

pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi beralih dari pantai ke pedalaman Jawa (Handayani et al. 2024, 121–138).

Ekonomi Kesultanan Mataram Islam berkembang pesat selama pemerintahan Sultan Agung. Karena kesultanan Mataram berada di wilayah pedalaman, ekonominya sebagian besar bergantung pada pertanian. Meskipun demikian, wilayah kekuasaannya juga mencakup wilayah pesisir utara Pulau Jawa (Lombard 2005, 102), di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai pelaut di pantai. Akhirnya, pelaut ini memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana barang-barang dikirim ke kesultanan Mataram. Pengelolaan tanah yang teratur dan terorganisir oleh Sultan Agung, sebagai pemegang otoritas penuh atas seluruh wilayah kesultanan Mataram, sangat penting untuk kemakmuran ekonomi kerajaan. Karena tanahnya subur dan memiliki banyak air, Sultan Agung memprioritaskan pengelolaan tanah untuk pertanian. Karena berada di pedalaman dan memiliki tanah yang subur, kerajaan Mataram menjadi negara pertanian yang sangat berkembang, bahkan menjadi negara pengeksport beras terbesar di masa itu (Moedjanto 1987, 88).

Pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi beralih dari pantai ke pedalaman Jawa saat Mataram muncul, menunjukkan bahwa mereka sangat terlibat dalam perdagangan laut. Kerajaan ini kuat dalam politik nusantara karena kombinasi elemen ekonominya, agraris dan maritim. Ekonomi Mataram bergantung pada sektor pertanian. Kerajaan ini dapat menghasilkan makanan seperti padi berkat tanahnya yang subur. Dengan sistem irigasi yang baik, seperti pembuatan saluran air, hasil panen meningkat. Di Mataram, tanaman rempah-rempah sangat penting. Perdagangan adalah inti ekonomi Mataram. Mataram berdagang dengan pedagang dari Tiongkok, India, dan Eropa. Beras, rempah-rempah, dan barang kerajinan adalah komoditas utama yang diperdagangkan (Moedjanto 1987, 88).

Adapun hal tersebut sangat tergantung pada kondisi dan cara pengelolaan tanah. Agar tanah dapat dikelola secara optimal untuk pertanian, distribusi tanah, terutama tanah lungguh, sangat penting. Pada masanya, pertanian adalah bagian penting dari ekonomi kerajaan. Sultan Agung membangun sistem irigasi dan danau buatan serta menerapkan sistem pertanian terpadu yang menghasilkan hewan dan tanaman seperti padi dan kerbau (Munawar 2020, 10). Petani tidak hanya diberdayakan untuk mengolah tanah mereka, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam bentuk pembinaan dan komunikasi untuk membantu mereka menjadi lebih produktif. Penduduk juga dipindahkan ke daerah baru untuk memperluas lahan pertanian, terutama di daerah yang diperluas oleh kerajaan. Dengan demikian, kebijakan Sultan Agung terhadap pengelolaan tanah di wilayah kekuasaannya mungkin berdampak positif pada stabilitas ekonomi kesultanan Mataram Islam. Dari situ masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengelola tanah secara maksimal dalam bidang pertanian, dan distribusi tanah.

Pertama, stok beras kesultanan Mataram membantu petani, bangsawan, pejabat kerajaan, dan istana makmur. Sistem bagi hasil yang menguntungkan seluruh masyarakat digunakan untuk mengelola hasil pertanian, terutama beras. Hasil panen dibagi menjadi empat puluh persen untuk petani, dua puluh persen untuk bekel, delapan puluh persen untuk demang, delapan puluh persen untuk bupati, dan dua puluh empat persen untuk istana. Kelebihan beras digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk perdagangan antar wilayah seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Batavia Mataram. Dengan demikian, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dengan pemerataan hasil beras yang merata (Muhsin et al. 2025, 63–76).

Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan penduduk di Kerajaan Mataram Islam didukung oleh sektor perdagangan yang menjadi sektor penting untuk keberlangsungan perekonomian pada masa itu. Ibukota Kerajaan Mataram Islam yakni Kota Kerta menjadi kota yang berpenduduk terpadat menjadi kota makmur, karena kegiatan perdagangan ramai dilakukan di kota tersebut. Pasar Kerta adalah tempat perdagangan

dilakukan oleh orang-orang lokal dan luar kerajaan. Pedagang dari luar kota seperti Jawa bagian tengah, barat dan timur berdatangan ke Kerta meskipun harus menempuh waktu yang lama selama dua bulan. Kerajaan Mataram Islam mengirimkan 15 ton beras ke Maluku setiap tahun melalui pelabuhan Jepara, dan pelabuhan Jawa bagian utara adalah tempat perdagangan besar. Hasil pertanian, alat-alat pertanian, gerabah, kain, perhiasan, dan hewan ternak adalah bagian dari perdagangan domestik. Selain itu, pelabuhan di pesisir Jawa bagian utara memungkinkan Kerajaan Mataram Islam mengimport barang-barang seperti senjata, kayu wungle, rotan, sutera, porselin, permata, keramik, dan merica dari pedagang asing.

### **Kebijakan Pajak yang diterapkan Sultan Agung**

Dalam memperkuat ekonomi kerajaan, Sultan Agung Hanyokrokusumo menerapkan pengawasan terhadap wilayah pesisir dan jalur perdagangan (de Graaf 1986, 138). Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh VOC yang mulai berkembang di Batavia. Namun, peperangan melawan VOC membutuhkan biaya besar sehingga memengaruhi stabilitas ekonomi kerajaan menjelang akhir pemerintahan Sultan Agung (de Graaf 1986, 145). Dalam hal ekonomi, Sultan Agung menetapkan beberapa kebijakan untuk membuat kerajaan Islam Mataram tetap stabil. Ada tiga jenis kebijakan ekonomi Sultan Agung: pertanian, fiskal, dan moneter (Munawar 2020, 10). Kebijakan pertanian dimulai dengan pemberian tanah kepada para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan, yang kemudian diberikan kepada para petani, yang ditugaskan untuk menggarap tanah tersebut. Untuk meningkatkan pertanian, forum komunikasi didirikan untuk membantu petani, membangun bendungan dan saluran air, melakukan pemberian modal dan intensifikasi tanaman padi, dan menetapkan pajak pertanian. Dalam hal keuangan, kebijakannya adalah mendirikan lembaga keuangan untuk mempermudah pengelolaan dana kerajaan.

Sebagai raja yang mengelola seluruh wilayah Mataram pada saat itu, Sultan Agung tentu menerapkan kebijakan ekonominya. Salah satu contohnya adalah pembayaran pajak, untuk tujuan itu Sultan Agung memilih dan memberikan wewenang kepada para pejabat. Pejabat ini, dari tingkat pusat hingga daerah, menerima kepercayaan penuh dari Sultan Agung (Munawar 2021, 1–13). Mereka diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur semua wilayah yang dipimpinnya, baik kutagara, negara agung, maupun pasisiran, terutama dalam hal mengawasi pajak sebagai sumber ekonomi kerajaan. Pajak, yang langsung masuk ke perbendaharaan kerajaan, dikelola oleh seorang raja di kutagara, yang merupakan daerah inti kerajaan. Kepala desa (petinggi atau bekel) mengumpulkan pajak dari rakyat di wilayah negara agung dan menyerahkannya kepada para atasannya, mulai dari demang, bupati, wedana, hingga patih, yang kemudian bertanggung jawab secara langsung kepada raja. Di wilayah asing dan pasisiran, pajak dikelola oleh para wedana-bupati. Bupati di negara lain diberi gelar Tumenggung atau Raden Arya, sedangkan wedana di negara asalnya diberi gelar yang berbeda. Bupati di negara lain diberi gelar Tumenggung atau Raden Arya, dan bupati di wilayah pasisiran diberi gelar Syahbandar. Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan secara bertingkat menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan Kerajaan Mataram Islam dilakukan melalui mekanisme yang terpusat. Pajak yang dipungut dari Masyarakat terlebih dahulu diserahkan kepada bekel, kemudian diteruskan secara berjenjang kepada demang, bupati, dan wedana sebelum akhirnya masuk ke perbendaharaan Kerajaan. Adanya proses redistribusi penerimaan yang memungkinkan pemerintah pusat mengkoordinasi pendapatan dari berbagai daerah sekaligus memperkuat sistem administrasi dan kewenangan pemerintah Kerajaan Mataram Islam.

Sultan Agung juga memilih jenis pajak apa yang harus dibayar kepada Kerajaan Mataram Islam. Pertama, dia menetapkan pajak penduduk, atau pajak kepala (Munawar 2020, 12). Pajak ini dikenakan kepada semua orang yang tinggal di Kerajaan Mataram Islam,

baik orang Jawa asli maupun orang asing yang tinggal di sana untuk berdagang atau alasan lainnya. Orang Cina yang menikah membayar 22,5 real, orang Cina yang tidak menikah 18 real, orang Jawa membayar 4,5 real, dan budak baru membayar 0,25 real. Para penguasa daerah menyerahkan pajak yang mereka kumpulkan selama setahun ke keraton pada waktu upacara Garebeg Mulud, yang berlangsung pada tanggal 12 bulan Mulud dalam kalender Jawa. Para penguasa daerah harus hadir pada kesempatan itu untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada raja dan menyerahkan pajak tahunan mereka. Lalu untuk kebijakan pajak yang kedua, pajak atas tanah. Salah satu bidang ekonomi yang sangat menguntungkan kerajaan adalah pajak tanah. Semua hasil bumi dari tanah yang dimiliki raja harus dikenakan pajak yang diserahkan kepada kerajaan karena raja adalah pemiliknya. Pembayaran pajak ditransfer ke para bekel dari petani sebagai penggarap. Berdasarkan perwilayahan, tanah narawita diberikan langsung kepada istana sebagai tanah yang menghasilkan makanan kerajaan. Untuk tanah apanage di wilayah negara agung, pajak dibayarkan secara berjenjang dari bekel ke patuh, yang merupakan pejabat pemegang apanage. Ada kemungkinan bahwa negara agung adalah tempat kaum bangsawan dan pembesar kerajaan menghasilkan uang. Selain dari tanah narawita, pendapatan raja juga berasal dari daerah negara agung, negara asing, dan pasisiran yang dikuasai oleh para bupati yang ditunjuk oleh raja.

Di wilayah Kerajaan Mataram Islam, padi adalah hasil pertanian terbesar. Setiap tahun, pemegang lungguh menerima pajak hasil bumi berupa padi (Kartodirdjo 1993, 214). Satu bahu hasil padi sama dengan satu real Spanyol jika dibayar dengan pajak. Ukuran luas tanah yang dipergunakan untuk menentukan jumlah hasil bumi atau besarnya pajak yang harus diserahkan kepada pemegang lungguh ialah jung. Setiap jung terdiri dari 5 bahu. Secara resmi, 1 jung terdiri atas 4 bahu, sebab yang sebah di pinjamkan kepada pegawai sebagai imbalan tugas jabatannya tanpa dibebani pemungutan atau pajak. Jadi, yang dibebani pemungutan-wajib atau pajak hanya 4 bahu, yaitu tanah yang dikerjakan oleh petani. Tanah pertanian empat bahu ini menghasilkan hasil maro; setengahnya diberikan kepada pemegang kuasa dan setengah lainnya diberikan kepada penduduk petani yang mengerjakan sawah-sawah milik mereka.

Ketiga, yaitu pajak upeti. Pembayaran pajak ditransfer ke para bekel dari petani sebagai penggarap. Pajak upeti juga merupakan pajak yang paling banyak menghasilkan uang untuk istana (Munawar 2020, 14). Para bupati dari pusat kerajaan, negara asing, pasisiran, dan wilayah vassal di luar pulau Jawa menerima upeti dari pedagang di laut utara, dan para gubernur menarik uang atau barang dari mereka. Setelah mereka menyisihkan bagian mereka, mereka kemudian menyerahkannya kepada para pengawas. Setelah para pengawas menyisihkan bagian mereka, mereka kemudian menyerahkannya kepada raja. Dengan cara yang sama, para bupati di negara lain menghormati pejabat bawahan mereka, yang pada gilirannya menghormati rakyat mereka. Kemudian, wedana-bupati bekerja sama untuk memberikan bagian yang sampai pada raja. Selain itu, Sultan Agung juga memberikan wewenang kepada wedana-bupati untuk mengawasi wilayah upeti di luar pulau Jawa. Ini mirip dengan bagaimana bupati Jepara mengawasi wilayah upeti Jambi, bupati Demak mengawasi wilayah Palembang, dan bupati Semarang mengawasi wilayah Sukadana di Kalimantan.

Upeti diberikan ke istana dua kali setahun, pada waktu Garebeg Pasa dan Mulud. Waktu ini juga digunakan untuk mengisi perbendaharaan kerajaan, memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat, dan menunjukkan kekuatan dan kebesaran raja (Munawar 2020, 15). Selain itu, untuk menunjukkan bahwa para Bupati benar-benar setia kepada raja, penyerahan biasanya disertai dengan kewajiban untuk menghadap raja sebagai kontrol politik. Sebuah tindakan tegas harus segera diambil untuk mencegah bupati tersebut melepaskan diri karena, jika dia tidak menghadap raja, itu pasti akan berontak. Di sini, kontrol

politik dikombinasikan dengan kontrol ekonomi karena pengakuan tunduk kepada Kerajaan Mataram Islam berarti upeti akan masuk ke kerajaan untuk meningkatkan kemakmurannya. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan Kerajaan, sistem perpajakan dan upeti menjadi sarana untuk memperkuat kontrol politik Sultan Agung terhadap daerah-daerah bawahannya. Kewajiban para bupati untuk menyerahkan upeti dan menghadap raja menunjukkan bahwa hubungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hubungan politik. Pemungutan pajak memastikan loyalitas para penguasa daerah terhadap pemerintahan pusat.

Keempat, pajak barang dan jasa. Untuk bea cukai barang dan jasa, orang Jawa menggunakan istilah mereka sendiri. Biaya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan atau pungutan yang diperoleh dari industri barang dan jasa ini. Perdagangan di pusat kerajaan, di luar negeri, dan di pesisiran dikenakan biaya selama pemerintahan Sultan Agung (Lombard 2005, 102). Pedagang yang pergi ke pusat Kerajaan Mataram Islam dikenakan cukai atas barang dan jasa mereka di berbagai pintu gerbang yang didirikan kerajaan. Pintunya termasuk Ampel, Slemby, Taji, Opak, Kaliagir, dan Gegeledakan. Setiap pelabuhan di pesisir utara memiliki seorang syahbandar yang ditunjuk pada masa Sultan Agung. Mereka bertanggung jawab atas pemungutan bea cukai untuk semua barang yang keluar dan masuk dari pelabuhan. Bea cukai ini dibayar di pabeyan, tempat pembayaran bea cukai dan pajak, di kota pelabuhan. Perdagangan di pelabuhan Jawa dikenakan cukai sebesar 4%. Selain bea cukai, raja juga meminta hadiah atau pemberian. Hal ini menjadi tanggung jawab tersendiri dari seorang Syahbandar. Keberagaman jenis pajak yang diterapkan Sultan Agung menunjukkan sistem perpajakan menjadi salah satu sumber utama penerimaan Kerajaan Mataram Islam. Penerimaan tersebut berasal dari pajak kepala, pajak tanah, upeti, dan bea perdagangan yang dipungut di wilayah daratan maupun Pelabuhan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki peran penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat kondisi ekonomi Kerajaan pada masa pemerintah Sultan Agung.

Seorang Syahbandar berada di Jepara, pelabuhan utama Kerajaan Mataram Islam. Jepara menjadi ibu kota pesisiran wetan dan tempat seorang wedana-bupati bertugas. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan daerah pesisir dipusatkan di kompleks dalem, atau rumah wedana-bupati. Beras adalah bahan ekspor terpenting, dan wedana-bupati di daerah ini sangat memperhatikannya. Ini terutama benar karena kebijakan Sultan Agung untuk monopoli ekspor beras (de Graaf 1986, 152). Pelabuhan utama Jepara bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari aktivitas perdagangan di Pesisir Pantai Utara. Para pedagang Belanda dan Cina di Jepara dibebaskan dari bea impor dan ekspor pada tahun 1614 oleh Sultan Agung. Pembebasan bea cukai ini dimaksudkan untuk menarik pedagang asing ke Jepara dan mendapatkan bantuan Belanda untuk menyerang Banten dan Surabaya.

### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan sistem ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Pembentukan lembaga keuangan seperti wedana gedong kiwa dan wedana gedong tengen menjadikan pengelolaan pemasukan kerajaan lebih terorganisasi dan terkontrol dengan baik (Hafni 2026, 20). Melalui lembaga tersebut, kerajaan dapat mengatur distribusi hasil pajak, upeti, serta pemasukan perdagangan secara lebih efektif sehingga kebutuhan pemerintahan dan pembangunan kerajaan dapat terpenuhi. Sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur juga membantu kerajaan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan dan perluasan wilayah kekuasaan Mataram Islam.

Selain itu, penggunaan uang sebagai alat transaksi perdagangan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Mataram Islam. Aktivitas perdagangan menjadi lebih mudah dilakukan karena masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem barter dalam melakukan pertukaran barang (Hafni 2026, 21). Perkembangan sistem moneter tersebut mendorong pertumbuhan perdagangan antardaerah maupun perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pemasukan kerajaan dari sektor perdagangan dan pajak juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memperkuat posisi Mataram Islam sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memiliki kekuatan ekonomi, agraris, dan maritim pada masa pemerintahan Sultan Agung.

Kemudian dari situ, kebijakan ekonomi dan moneter Sultan Agung juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Mataram Islam. Stabilitas ekonomi kerajaan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian, perdagangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah kerajaan. Sistem administrasi keuangan yang teratur menjadikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah semakin terkontrol, terutama dalam pengelolaan pajak dan distribusi hasil bumi (Hafni 2026, 22). Dengan demikian, kebijakan moneter Sultan Agung tidak hanya berpengaruh terhadap kekuatan ekonomi kerajaan, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan Mataram Islam pada abad ke-17.

### **Pembentukan Lembaga Keuangan/ Organisasi Keuangan**

Sultan Agung Hanyokrokusumo melakukan pembentukan lembaga keuangan dan organisasi ekonomi untuk mendukung stabilitas serta perkembangan perekonomian kerajaan Mataram. Salah satu langkahnya adalah mendirikan lembaga yang berfungsi sebagai bank perdagangan guna memudahkan transaksi ekonomi, memberikan pinjaman kepada pedagang, serta membantu pengelolaan modal usaha (Munawar 2025, 108). Selain itu, Sultan Agung membentuk lembaga pemungutan pajak yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pertahanan kerajaan, sekaligus memastikan hasil pajak digunakan bagi kepentingan umum (Munawar 2025, 112). Di bidang ekonomi rakyat, ia juga memperkenalkan lembaga pemberian pinjaman bagi petani dan pengrajin agar kegiatan pertanian serta kerajinan dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Munawar 2025, 117).

Pembentukan organisasi pemerintahan dan lembaga keuangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Mataram Islam pada masa Sultan Agung telah memiliki sistem administrasi yang cukup terstruktur. Dalam pelaksanaannya, para pejabat kerajaan diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik dalam pengelolaan keuangan, perdagangan, maupun pengawasan pajak kerajaan (Munawar 2025, 113). Sistem organisasi tersebut membantu kerajaan dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran negara sehingga aktivitas pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pengawasan terhadap daerah-daerah bawahan juga menjadi lebih mudah karena adanya pembagian wewenang yang jelas antara pejabat pusat dan daerah.

Keberadaan lembaga ekonomi dan organisasi keuangan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perdagangan dan kesejahteraan masyarakat Mataram Islam. Pedagang memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan, sedangkan petani mendapatkan dukungan modal untuk meningkatkan hasil pertanian mereka (Munawar 2025, 118). Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi kerajaan sekaligus memperkuat posisi Mataram Islam sebagai kerajaan agraris dan maritim yang besar di Nusantara. Dengan adanya sistem organisasi ekonomi yang lebih teratur, Sultan Agung mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta memperkuat kekuatan ekonomi kerajaan pada abad ke-17.

## **Dampak Kebijakan**

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Sultan Agung memberikan dampak positif yang besar terhadap kehidupan perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Pengelolaan pajak yang lebih teratur dan jelas berhasil meningkatkan pendapatan negara sehingga kerajaan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pertahanan, serta kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengaturan jumlah uang yang beredar mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi sehingga menumbuhkan kepercayaan para pedagang dan investor. Sultan Agung juga memberikan perlindungan terhadap aktivitas perdagangan sehingga para pedagang dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan teratur. Di bidang perdagangan internasional, kebijakan yang mendukung ekspor dan hubungan dagang dengan wilayah lain turut meningkatkan pendapatan kerajaan serta membawa berbagai teknologi dan barang baru yang memperkaya kehidupan masyarakat.

Di samping memberikan dampak positif, kebijakan Sultan Agung juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi masyarakat. Sistem pajak yang diterapkan sering kali dianggap memberatkan, terutama bagi petani dan pedagang kecil karena mereka harus membayar pajak dalam jumlah tinggi sehingga mengurangi pendapatan yang dimiliki. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi dan menghambat perkembangan usaha masyarakat kecil. Selain itu, dominasi pemerintah dalam pengelolaan lembaga keuangan membuat masyarakat menjadi lebih bergantung pada kebijakan kerajaan. Ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi kemandirian ekonomi, inisiatif, dan inovasi masyarakat karena banyak kegiatan ekonomi harus menunggu dukungan atau izin dari pihak kerajaan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika perekonomian Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613–1645 berkembang secara signifikan melalui penerapan kebijakan ekonomi yang terstruktur dalam bidang pertanian, perdagangan, perpajakan, dan moneter. Sultan Agung berhasil membangun sistem ekonomi kerajaan yang berbasis agraris dan maritim melalui pengelolaan tanah, pembangunan irigasi, pengawasan jalur perdagangan, serta pembentukan lembaga keuangan kerajaan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan kerajaan, berkembangnya perdagangan antardaerah, serta menguatnya posisi Mataram Islam sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Selain itu, sistem administrasi ekonomi yang terpusat mampu memperkuat stabilitas politik dan mendukung keberlangsungan pemerintahan kerajaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian sejarah ekonomi Islam dengan menempatkan aspek ekonomi sebagai faktor utama dalam perkembangan dan kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa kekuatan Mataram Islam tidak hanya dibangun melalui ekspansi politik dan militer, tetapi juga melalui pengelolaan ekonomi yang terorganisasi dan terkontrol. Penelitian ini turut memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan ekonomi kerajaan dengan perkembangan sosial, perdagangan, dan struktur pemerintahan masyarakat Jawa pada masa Sultan Agung. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi sejarah ekonomi kerajaan Islam di Nusantara. Hasil penelitian ini juga membuka peluang pengembangan kajian yang lebih luas mengenai sistem ekonomi kerajaan Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan jaringan perdagangan internasional, sistem administrasi keuangan kerajaan, dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada hubungan ekonomi Mataram Islam dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara serta perkembangan perdagangan maritim pada abad ke-17. Dengan pengembangan tersebut, kajian sejarah ekonomi Islam di Nusantara akan semakin

memperkaya pemahaman mengenai peranan kerajaan Islam dalam membentuk dinamika ekonomi dan politik Indonesia pada masa lampau.

## Daftar Pustaka

- Adiwijaya. (1956). Pengenalan Raja-Raja Surakarta Sejak Mataram (Naskah No. 487).  
Candrakanta. (1902–1912). Radya Pustaka (Naskah No. 1802).  
Chronicle of Java. (1917). Van Dorp. (No. 2, Naskah No. 1083).  
de Graaf, H. J. (1986). Puncak kekuasaan Mataram: Politik ekspansi Sultan Agung. Grafiti Pers.  
Hafni, D. A. (2026). Jejak akuntansi di Pulau Jawa: Historiografi masa kejayaan Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam. *Jurnal Media Akademik*, 4(2), 20.  
Handayani, M., Malik, M. I., Yasin, V. F., & Maulana, M. H. Y. (2024). Kejayaan Kerajaan Mataram Islam dan pengaruhnya untuk Nusantara pada masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613–1645 M. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan*, 2, 121–138.  
Kronik Tanah Jawi. (1939–1941). Balai Pustaka. (Vol. 7, Naskah No. 1024).  
Lombard, D. (2005). Nusa Jawa: Silang budaya (Jilid 1). Gramedia.  
Muhsin, I., Maharsi, M., Faidi, A., & Latifah, Z. (2025). The development of maritime culture in the Islamic Mataram Kingdom: Social, economic, and political dynamics during the time of Sultan Agung (1613–1645 AD). *Diakronika*, 25, 63–76.  
Munawar, Z. (2013). Kebijakan ekonomi Sultan Agung pada masa Kerajaan Mataram Islam tahun 1613–1645 M.  
Organisasi pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung (1613–1645 M). (2025). *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9, 108–119.  
Padmasusastra. (1898). Bauwarna (Jilid 2/2: Ta, Naskah No. 205).  
Pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam masa Sultan Agung, 1613–1645 M. (2020). *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>  
Prawirawinarsa, & Jayengpranata. (1921). Babad Kartasura (Naskah No. 989).  
Purwadi. (2007). Sejarah raja-raja Jawa: Sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa. Media Abadi.  
Rizal Zamzami. (2018). Sejarah agama Islam di Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senapati, 1584–1601. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2(2), 154–165.  
Sartono Kartodirdjo. (1993). Pengantar sejarah Indonesia baru: Sejarah nasional dari kolonialisme sampai nasionalisme. Gramedia Pustaka Utama.  
Sinaga, M., Lestari, N. I., Cahyani, A. G., & Ramadanti, A. (2023). Peran sentral potensi geografis terhadap Kerajaan Mataram Islam. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 1–9.  
Tanah, otoritas politik, dan stabilitas ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613–1645 M). (2021). *Diakronika*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>  
Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). Metode penelitian sejarah: Dari riset hingga penelusuran. Magnum Pustaka.